

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan mengenai kinerja keuangan daerah Kabupaten Bantul dapat ditarik kesimpulan berdasarkan indikator kinerja yang digunakan bahwa secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul belum dapat dikategorikan baik. Hal ini terlihat dari:

1. Derajat Desentralisasi Fiskal Pemda Kabupaten Bantul dikategorikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Pemerintah Daerah masih didominasi oleh Sumbangan dari Pemerintah Pusat.
2. Derajat Kemandirian Daerah Pemda Kabupaten Bantul dikategorikan rendah. Kemampuan Pemda Kabupaten Bantul dalam membiayai Kebutuhannya dari PAD maupun BHPBP masih rendah.
3. Besarnya persentase Rasio Efektivitas yang dicapai selama periode penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemda Kabupaten Bantul belum mampu dalam melaksanakan tugasnya untuk merealisasikan PAD guna memenuhi target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dengan kata lain kinerja Pemda Kabupaten Bantul belum dapat dikategorikan efektif.
4. Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tidak dapat diukur karena tidak tersedianya data realisasi biaya punggut PAD pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.

5. Rasio Aktivitas yang dimiliki Pemda Bantul memperlihatkan bahwa Pengeluaran Pemerintah telah didominasi oleh Belanja Pembangunan selama dua tahun terakhir periode penelitian. Dengan demikian kinerja Pemda Kabupaten Bantul dapat dikatakan baik karena adanya peningkatan sarana dan prasarana publik.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam analisis yang dikemukakan dalam kesimpulan di atas maka penulis mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Rendahnya Derajat Desentralisasi Fiskal dan Derajat Kemandirian Daerah Pemda Kabupaten Bantul dapat ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah melalui:
 - a) Perluasan basis penerimaan dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru (potensial) serta jumlah pembayar pajak dan memperbaiki basis data objek, penilaian kemampuan setiap wajib pajak secara cepat dan akurat serta menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
 - b) Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan Daerah (Perda), mengubah tarif khususnya tarif retribusi serta dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - c) Melakukan pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala terhadap wajib pajak, memperbaiki proses pengawasan untuk menghindari kebocoran dana yang sangat berarti bagi

daerah, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap fiskus, serta meningkatkan pelayanan pajak yang diberikan oleh daerah.

- d) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan melalui perbaikan prosedur administrasi pajak (penyederhanaan administrasi pajak) dan meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
 - e) Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di daerah.
2. Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat ditingkatkan melalui perbaikan mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran dengan cara merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Dengan demikian besarnya penerimaan yang berasal dari daerah berdasarkan potensi riil dapat diprediksi sehingga penetapan target PAD menjadi lebih realistis.
 3. Perlunya pengendalian agar transparansi dapat tercipta. Hal ini akan mendorong perbaikan kinerja melalui evaluasi untuk mengetahui apakah Dipenda Kabupaten Bantul telah menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara efisien dalam melakukan pemungutan PAD.
 4. Penyediaan sarana dan prasarana publik dapat terus ditingkatkan dengan meningkatkan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan peningkatan PAD maka potensi penerimaan pinjaman guna membiayai investasi pembangunan juga meningkat serta dengan melibatkan pihak swasta untuk mendukung infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 Tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Kadjatmiko. 2003. Tinjauan Yuridis Penerimaan dan Belanja Daerah. Didownload di <http://www.clgi.or.id>

Landiyanto, Erlangga A. 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. Didownload di <http://www.google.com>.

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah TK II Bantul. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas dan Instansi-instansi Lain yang Membantu/Berkaitan dengan Usaha Pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.

Republik Indonesia. Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Riduwan. 2003. Dasar-dasar Statistika, Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta

Sadjiarto, Arja. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.2, No. 2. Nopember 2000.

Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. Didownload di <http://www.google.com>.

Simanjuntak, Robert A. 2003. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Didownload di <http://www.clgi.or.id>

Sulbio. 2004. Statistik Penelitian Kuantitatif. Didownload di <http://www.google.com>.

Wulandari, Rini. 2004. Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah Yogyakarta. Skripsi. FE UAJY. Yogyakarta, (tidak dipublikasikan)

_____. 2003 Pengukuran Kinerja dan Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah. Didownload di <http://www.altavista.com>



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. RW Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Tlp. 367533, Fax (0274)367796

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 226

Membaca Surat : Fak. Ekonomi UAJY Yogyakarta Nomor : 120/R/I
Tanggal : 02 Maret 2006 Perihal : Permoh. Data Utk Penls Dkripsi

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 1983 tentang Pedoman pendataan Sumber dan Potensi Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ; dan
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/12/2004 tentang pemberian ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa

Dijinkan kepada :

Nama : **IRMINA MALIRMASELA No. Mhs/NIM : 12433/EA Mhs: UAJY Yk**

Judul : **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL.**

Lokasi : Kab. Bantul.

Waktu : Tanggal : 08 Maret 2006 s/d 08 Juni 2006.

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat pemerintah setempat (Dinas/ Instansi/ Camat/ Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberikan laporan kepada Bupati (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Bantul.
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul.
Pada tanggal : 08 Maret 2006

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Bantul.
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab.Bantul.
3. Ka Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bantul.
4. Ka Bappeda Kab. Bantul.
5. Ka BPS Kab. Bantul.
6. Ka Bag Keuangan Setda Bantul.
7. Yang bersangkutan
8. Peringgal.





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jln. RW Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Tlp. 367533, Fax (0274)367796

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 226

Membaca Surat : Fak. Ekonomi UAJY Yogyakarta Nomor : 120/R/I
Tanggal : 02 Maret 2006 Perihal : Permoh. Data Utk Penls Dkripsi

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 tahun 1983 tentang Pedoman pendataan Sumber dan Potensi Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ; dan
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/12/2004 tentang pemberian ijin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa

Dijinkan kepada :

Nama : **IRMINA MALIRMASELA No. Mhs/NIM : 12433/EA Mhs: UAJY Yk**

Judul : **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL.**

Lokasi : Kab. Bantul.

Waktu : Tanggal : 08 Maret 2006 s/d 08 Juni 2006.

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat pemerintah setempat (Dinas/ Instansi/ Camat/ Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberikan laporan kepada Bupati (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Bantul.
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat Ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul.
Pada tanggal : 08 Maret 2006

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Bantul.
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul.
3. Ka Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bantul.
4. Ka Bappeda Kab. Bantul.
5. Ka BPS Kab. Bantul.
6. Ka Bag Keuangan Setda Bantul.
7. Yang bersangkutan
8. Peringgal.



REKAPITULASI PERHITUNGAN APBD
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2000

| Uraian | PENDAPATAN | | Selisih | PENGELUARAN | | Selisih |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | Anggaran | Realisasi | | Anggaran | Realisasi | |
| A. Pendapatan | | | | | | |
| 1 Bag. sisa lebih perhitungan T.A sebelumnya | | | | | | (8.368.379,12) |
| | 4.344.621.302,52 | 4.344.621.302,52 | - | 73.389.822.401,35 | 65.021.442.460,12 | (7.960.649,00) |
| 2 Bag. Pendapatan Asli Daerah | 6.560.046.240,28 | 7.074.418.153,28 | 514.371.913,00 | 4.255.658.513,00 | 4.045.458.882,00 | (210.199,00) |
| a. Pajak Daerah | 1.407.752.000,00 | 1.522.121.141,00 | 114.369.141,00 | 495.183.700,00 | 480.607.375,00 | (14.576,00) |
| b. Retribusi Daerah | 4.284.170.320,00 | 4.456.880.414,00 | 172.710.094,00 | 79.835.000,00 | 78.098.100,00 | (1.736,00) |
| c. Bagian Laba BUMD | 644.234.315,28 | 644.234.315,28 | - | 2.111.836.669,00 | 2.176.472.287,00 | 64.635,00 |
| d. Penerimaan Lain-lain | 223.889.605,00 | 451.182.283,00 | 227.292.678,00 | 693.000.000,00 | 651.160.115,83 | (41.835,00) |
| 3 Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan atau Instansi yg Lebih Tinggi | 87.208.335.030,55 | 83.039.914.028,67 | (4.168.421.001,88) | 888.165.303,29 | 888.138.303,29 | (26,00) |
| a. Bagi Hasil Pajak | 4.327.456.777,55 | 7.973.999.009,02 | 3.646.542.231,47 | 294.388.600,00 | 290.411.864,00 | (3.970,00) |
| b. Bagi Hasil Bukan Pajak | 0,00 | 95.031.316,85 | 95.031.316,85 | 620.706.661,06 | 420.697.425,00 | (200.005,00) |
| c. Subsidi Daerah Otonom | 63.070.898.253,00 | 55.171.355.221,00 | (7.899.543.032,00) | | | |
| d. Bantuan Pembangunan | 19.809.980.000,00 | 19.799.528.481,80 | (10.451.518,20) | | | |
| 4 Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah | 2.543.900.000,00 | 2.543.900.000,00 | 0,00 | 27.267.080.172,00 | 26.745.497.386,88 | (521.582,12) |
| a. Pinjaman Pemerintah Pusat | | | | 5.907.500,00 | 5.907.500,00 | - |
| b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri | 2.543.900.000,00 | 2.543.900.000,00 | - | 882.826.000,00 | 831.931.125,00 | (30.894,00) |
| | | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - |
| | | | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | - |
| | | | | 1.936.034.072,00 | 2.014.439.019,08 | 78.404,00 |
| | | | | 10.370.593.000,00 | 10.292.002.851,80 | (78.590,00) |
| | | | | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | - |
| | | | | 197.250.000,00 | 196.128.185,00 | (1.121,00) |
| | | | | 549.950.000,00 | 542.400.600,00 | (7.549,00) |
| | | | | 1.088.581.000,00 | 1.035.729.450,00 | (52.851,00) |

REKAPITULASI PERHITUNGAN APBD
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2000

| PENDAPATAN | | | PENGELUARAN | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| Uraian | Anggaran | Realisasi | Selisih | Uraian | Anggaran | Realisasi |
| | | | | 11 Sektor Pendidikan,kebud.,nas, keperc. kpd Tuhan YME, Pe muda dan olah raga | 1.746.423.500,00 | 1.722.391.800,00 |
| | | | | 12 Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera | 32.650.000,00 | 32.650.000,00 |
| | | | | 13 Sektor Kesehatan., kescjahteraan sosial,peran.wanita,anak dan remaja | 611.924.500,00 | 606.484.226,00 |
| | | | | 14 Sektor Perumahan dan Pemu - kiman | 5.632.185.000,00 | 5.542.161.400,00 |
| | | | | 15 Sektor Agama | 307.872.000,00 | 237.732.600,00 |
| | | | | 16 Sektor Ilmu Penget. dan Tekn. | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | | | | 17 Sektor Hukum | 56.200.000,00 | 53.495.875,00 |
| | | | | 18 Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan | 2.600.812.500,00 | 2.455.396.755,00 |
| | | | | 19 Sektor Politik, penerangan, ko- munikasi dan media massa | 189.381.100,00 | 98.193.500,00 |
| | | | | 20 Sektor Kam. dan ket. umum | 128.640.000,00 | 128.602.500,00 |
| | | | | 21 Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawah | 899.750.000,00 | 899.750.000,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 100.656.902.573,35 | 97.002.853.484,47 | (3.654.049.088,88) | JUMLAH BELANJA | 100.656.902.573,35 | 91.766.939.847,00 |
| C. Urusan Kas dan Perhitungan | 4.190.326.085,00 | 4.875.548.423,00 | (685.222.338,00) | C. Urusan Kas dan Perhitungan | 59.376.778.752,00 | 4.875.548.423,00 |

Sisa Perhitungan

**REKAPITULASI PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2001**

| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | SELISIH | NO | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PENDAPATAN | | | | | BELANJA | | |
| BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN | | | | A. | RUTIN | | |
| ANGGARAN TAHUN YANG LALU | 5.235.913.637,47 | 5.235.913.637,47 | | 1. | Belanja Pegawai | 237.967.717.537,80 | 227.525.095.795,46 |
| BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH | 13.105.526.762,58 | 14.073.123.545,58 | 967.596.783,00 | 2. | Belanja Barang | 120.881.336.754,00 | 112.205.247.698,00 |
| 1. Pajak Daerah | 2.096.679.791,00 | 2.674.755.471,00 | 578.075.680,00 | 3. | Belanja Pemeliharaan | 6.110.195.560,00 | 6.224.501.643,00 |
| 2. Retribusi Daerah | 8.244.423.948,00 | 8.467.347.433,00 | 222.923.485,00 | 4. | Belanja Pejalan Dinas | 2.520.491.281,00 | 2.502.665.970,00 |
| 3. Bagian Laba Usaha Daerah | 972.323.846,58 | 974.168.031,58 | 1.844.185,00 | 5. | Cadangan | 555.079.000,00 | 535.435.330,00 |
| 4. Lain - lain Pendapatan | 1.792.099.177,00 | 1.956.852.610,00 | 164.753.433,00 | 6. | Anggaran/Pinjaman Hutang dan Bunga | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 |
| BAGIAN DANA PERBANGUNAN | 190.929.840.049,00 | 192.548.646.555,72 | 1.618.806.506,72 | 7. | Ganjaran Subsidi/Sumbangan kpd Daerah Bawah | 21.421.789.260,00 | 14.863.824.118,46 |
| 1. Pos Bagi Hasil Pajak | 8.639.837.940,00 | 10.957.442.971,00 | 2.317.605.031,00 | 8. | Pengeluaran tidak termasuk Bag. Lain | 1.194.000.296,00 | 1.164.854.296,00 |
| 2. Pos Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam | 704.390.109,00 | 5.591.584,72 | (698.798.524,28) | 9. | Pengeluaran Tidak Tersangka | 80.725.147.650,00 | 85.716.933.440,00 |
| 3. Pos Dana Alokasi Umum | 180.450.612.000,00 | 180.450.612.000,00 | | B. | PEMBANGUNAN | 1.059.677.736,80 | 811.653.300,00 |
| 4. Pos Dana Darurat | 1.135.000.000,00 | 1.135.000.000,00 | | 1. | Sektor Industri | 32.042.832.984,00 | 31.372.852.349,50 |
| BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH | 20.000.000.000,00 | | | 2. | Sektor Pertanian dan Kehutanan | 71.654.500,00 | 71.141.500,00 |
| 1. Pinjaman dari Pemerintah Pusat | | | | 3. | Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi | 1.092.168.375,00 | 1.084.117.270,00 |
| 2. Pinjaman dari Lembaga Keuangan D.N | 20.000.000.000,00 | 13.583.843.720,00 | (6.416.156.280,00) | 4. | Sektor Tenaga Kerja | 1.814.855.000,00 | 1.705.498.715,00 |
| BAGIAN LAIN PENERIMAAN YANG SAH | 40.739.270.072,75 | 41.890.757.377,11 | 1.151.487.304,36 | 5. | Keuangan Daerah dan Koperasi | 70.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| | | | | 6. | Sektor Transportasi | 2.286.999.124,00 | 2.245.594.011,00 |
| | | | | 7. | Sektor Pertambangan dan Energi | 11.069.250.000,00 | 10.982.485.518,50 |
| | | | | 8. | Sektor Pariwisata dan Telkom Daerah | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| | | | | 9. | Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman | 291.150.000,00 | 284.658.325,00 |
| | | | | 10. | Sektor Lingk. Hidup dan Tata Ruang | 815.900.000,00 | 813.353.500,00 |
| | | | | 11. | Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Keperayaan kpd. Tuhan YME dan Olahraga | 300.837.835,00 | 300.106.875,00 |
| | | | | 12. | Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Wanita, Anak dan Remaja | 1.023.993.250,00 | 1.010.733.400,00 |
| | | | | 13. | Sektor Perumahan dan Pemukiman | 27.500.000,00 | 27.499.550,00 |
| | | | | 14. | Sektor Agama | 5.163.198.500,00 | 5.042.231.427,00 |
| | | | | 15. | Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 2.884.000.000,00 | 2.842.103.083,00 |
| | | | | 16. | Sektor Hukum | 302.379.000,00 | 301.719.000,00 |
| | | | | 17. | Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan | 404.550.000,00 | 403.046.000,00 |
| | | | | 18. | Sektor Politik, Fenerangan, Komunikasi dan Media massa | 72.015.000,00 | 69.885.350,00 |
| | | | | 19. | Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum | 2.901.157.000,00 | 2.697.749.925,00 |
| | | | | 20. | Sektor Subsidi Pemb. kpd Daerah Bawah | 263.919.600,00 | 263.623.100,00 |
| | | | | 2P.0.A | | 39.605.800,00 | 39.605.800,00 |
| | | | | | | 1.146.000.000,00 | 1.146.000.000,00 |
| Jumlah Pendapatan | 270.010.550.521,90 | 267.332.284.835,88 | (2.678.265.685,92) | | Jumlah Belanja | 270.010.550.521,80 | 258.897.948.144,96 |
| Unsur Kas dan Perhitungan | 7.494.383.267,00 | 22.567.062.279,00 | 15.072.679.012,00 | | Unsur Kas dan Perhitungan | 7.494.383.267,00 | 15.275.598.637,00 |

209 899 747 14188

Sisa Perhitungan

**REKAPITULASI PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2002**

| NO. | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | SELISIH | NO. | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------|-----|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 1 | PENDAPATAN | | | | II | BELANJA | | |
| 1 | BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU | 15.725.800.332,92 | 15.725.800.332,92 | | A | RUTIN | 279.532.487.058,51 | 259.772.828.416,68 |
| 2 | BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | 1 | Belanja Pegawai | 240.786.858.827,75 | 221.192.722.457,75 |
| | a. Pajak Daerah | 22.175.561.587,59 | 22.425.146.059,70 | 249.584.472,11 | 2 | Belanja Barang | 17.689.937.705,00 | 18.370.732.358,00 |
| | b. Retribusi Daerah | 4.803.611.193,00 | 4.885.906.506,00 | 85.295.313,00 | 3 | Belanja Pemeliharaan | 11.781.534.225,00 | 11.230.870.254,00 |
| | c. Bagian Laba Usaha Daerah | 12.538.449.170,00 | 12.162.662.721,00 | (375.786.449,00) | 4 | Belanja Perjalanan Dinas | 907.455.840,00 | 883.407.000,00 |
| | d. Lain-lain Pendapatan | 3.054.231.405,59 | 3.054.231.742,59 | 337,00 | 5 | Cadangan | | |
| | | 1.779.269.819,00 | 2.319.345.090,11 | 540.075.271,11 | 6 | Angsuran Pinjaman Hutang dan Bunga | 1.271.341.500,00 | 1.215.760.898,93 |
| 3 | BAGIAN DANA PERIMBANGAN | | | | 7 | Anggaran Subsidi/Sumbangan kpd daerah Bawahan | 1.419.406.000,00 | 1.400.255.500,00 |
| | a. Pos Bagi Hasil Pajak | 271.987.314.298,00 | 271.624.617.597,24 | (362.696.700,76) | 8 | Pengeluaran Yang Tidak Termasuk bagian Lain | 4.016.497.200,00 | 3.934.230.491,00 |
| | b. Pos Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam | 12.642.287.684,00 | 12.682.607.271,00 | 40.319.587,00 | 9 | Pengeluaran yang tidak Tersangka | 1.659.455.660,76 | 1.544.849.487,00 |
| | c. Pos dana Alokasi Umum | 665.026.614,00 | 262.010.326,24 | (403.016.287,76) | B | PEMBANGUNAN | 55.187.870.150,00 | 54.985.865.895,00 |
| | | 258.680.000.000,00 | 258.680.000.000,00 | | 1 | Sektor Industri | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 4 | BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH | | | | 2 | Sektor Pertanian dan Kehutanan | 1.049.515.000,00 | 1.028.441.350,00 |
| | a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat | | | | 3 | Sektor sumber Daya Air dan Irigasi | 202.525.000,00 | 184.267.430,00 |
| | b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan DN | | | | 4 | Sektor tenaga Kerja | 86.688.000,00 | 85.021.350,00 |
| | | | | | 5 | Sektor Pertaga, Pengemb. Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi | 10.298.506.700,00 | 10.382.570.455,00 |
| | | | | | 6 | Sektor Transportasi | 16.681.945.500,00 | 16.666.608.870,00 |
| | | | | | 7 | Sektor Pertambangan dan Energi | 4.720.000,00 | 4.720.000,00 |
| | | | | | 8 | Sektor Pariwisata dan Telkom Daerah | 560.000.000,00 | 552.397.475,00 |
| | | | | | 9 | Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman | 2.842.056.700,00 | 2.809.920.475,00 |
| | | | | | 10 | Sektor Limbk.Hidup dan Tata Ruang | 4.612.888.000,00 | 4.576.040.300,00 |
| | | | | | 11 | Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Keperayaan kpd Tuhan YME dan olahraga | 4.230.673.000,00 | 4.218.570.500,00 |
| | | | | | 12 | Sektor Kependudukan dan Kel.Sejahtera | 49.624.000,00 | 49.624.000,00 |
| | | | | | 13 | Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Wanita, Anak dan Remaja | 4.807.541.250,00 | 4.766.848.475,00 |
| | | | | | 14 | Sektor Perumahan dan Pemukiman | 894.500.000,00 | 893.463.000,00 |
| | | | | | 15 | Sektor Agama | 1.104.240.000,00 | 1.047.401.550,00 |
| | | | | | 16 | Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 176.277.000,00 | 175.735.900,00 |
| | | | | | 17 | Sektor Hukum | 157.573.000,00 | 149.567.325,00 |
| | | | | | 18 | Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan | 6.289.540.000,00 | 6.248.273.740,00 |
| | | | | | 19 | Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media massa | 609.146.500,00 | 608.220.000,00 |
| | | | | | 20 | Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum | 537.920.500,00 | 536.173.750,00 |
| | Jumlah | 334.720.357.208,51 | 336.570.263.783,43 | 1.849.906.574,92 | | Jumlah | 334.720.357.208,51 | 314.788.694.341,68 |
| | Usuran Kas dan Perhitungan | | 72.727.949.164,00 | 22.727.949.164,00 | | Usuran Kas dan Perhitungan | | 22.330.910.595,00 |

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Bertambah (Berkurang) | | |
|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| A | PENDAPATAN | 386.247.932.185,81 | 389.393.986.778,40 | 3.146.054.592,59 | | |
| | I | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 31.364.543.187,76 | 32.882.358.490,40 | 1.517.815.302,64 | |
| | - | Pajak Daerah | 6.437.296.400,00 | 6.600.583.794,00 | 163.287.394,00 | |
| | - | Retribusi Daerah | 17.937.662.280,00 | 18.489.365.638,00 | 551.703.358,00 | |
| | - | Bagian Laba Usaha Daerah | 3.425.000.000,00 | 3.467.226.010,72 | 42.226.010,72 | |
| | - | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | 3.564.584.507,76 | 4.325.183.047,68 | 760.598.539,92 | |
| | II | DANA PERIMBANGAN | 324.640.798.367,05 | 326.269.036.657,00 | 1.628.238.289,95 | |
| | - | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 15.605.073.443,17 | 17.112.676.886,00 | 1.507.603.442,83 | |
| | - | Dana Alokasi Umum | 292.700.000.000,00 | 292.700.000.000,00 | - | |
| | - | Dana Alokasi Khusus | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | - | |
| | - | Dana Perimbangan dari Propinsi | 15.335.724.923,88 | 15.456.359.771,00 | 120.634.847,12 | |
| | III | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | 30.242.590.631,00 | 30.242.591.631,00 | 1.000,00 | |
| | B | BELANJA | 400.046.898.784,80 | 389.277.630.535,19 | (10.769.268.249,61) | |
| | | I | APARATUR DAERAH | 114.658.656.896,80 | 107.292.124.620,95 | (7.366.532.275,85) |
| | | - | Belanja Administrasi Umum | 77.993.935.040,00 | 71.852.874.926,15 | (6.141.060.113,85) |
| - | | Belanja Operasi dan Pemeliharaan | 28.225.773.581,80 | 27.100.422.619,80 | (1.125.350.962,00) | |
| - | | Belanja Modal | 8.438.948.275,00 | 8.338.827.075,00 | (100.121.200,00) | |
| II | | PELAYANAN PUBLIK | 285.388.241.888,00 | 281.985.505.914,24 | (3.402.735.973,76) | |
| - | | Belanja Administrasi Umum | 183.485.231.900,00 | 182.953.673.530,00 | (531.558.370,00) | |
| - | | Belanja Operasi dan Pemeliharaan | 22.976.673.285,00 | 21.975.375.208,95 | (1.001.298.076,05) | |
| - | | Belanja Modal | 29.848.455.765,00 | 28.599.217.853,29 | (1.249.237.911,71) | |
| - | | Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan | 46.341.098.278,00 | 45.752.466.021,00 | (588.632.257,00) | |
| - | | Belanja Tidak Tersangka | 2.736.782.660,00 | 2.704.773.301,00 | (32.009.359,00) | |
| SURPLUS (DEFISIT) | | (13.798.966.598,99) | 116.356.243,21 | 13.915.322.842,20 | | |
| C | | I | PEMBIAYAAN | | | |
| | | Penerimaan Daerah | 47.876.943.509,75 | 46.622.316.657,75 | (1.254.626.852,00) | |
| | | - | Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu | 22.208.608.010,75 | 22.208.608.010,75 | - |
| | - | Transfer ke Dana Cadangan | - | - | - | |
| | - | Penerimaan Pinjaman dan Obligasi | - | - | - | |
| | - | Penjualan Aset Daerah yg Dipisahkan | - | - | - | |
| | - | Urusan Kas dan Perhitungan | 25.668.335.499,00 | 24.413.708.647,00 | (1.254.626.852,00) | |
| | II | Pengeluaran Daerah | 34.077.976.910,76 | 32.414.411.104,02 | (1.663.565.806,74) | |
| | - | Transfer Dana Cadangan | - | - | - | |
| | - | Penyertaan Modal | 7.213.811.487,76 | 7.208.123.655,76 | (5.687.832,00) | |
| - | Pembayaran Hutang Pokok yg Jatuh Tempo | 798.791.355,00 | 798.791.331,26 | (23,74) | | |
| - | Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan | - | - | - | | |
| - | Urusan Kas dan Perhitungan | 26.065.374.068,00 | 24.407.496.117,00 | (1.657.877.951,00) | | |
| SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN | | 13.798.966.598,99 | 14.207.905.553,73 | 408.938.954,74 | | |

2004

| NO | URAIAN | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan Anggaran | Keterangan | |
|----|---|--|--------------------|-----------------------|
| | | | Jumlah | Berlebih (Berkurang) |
| A | <u>Pendapatan</u> | 355.221.231.166,75 | 398.879.892.641,80 | 3.658.661.475,05 |
| I | Pendapatan Asli Daerah | 30.879.516.528,16 | 30.777.820.174,83 | (101.696.353,33) |
| | Pajak daerah | 6.951.700.000,00 | 7.085.891.785,00 | 134.191.785,00 |
| | Retribusi | 19.620.691.600,00 | 19.186.122.250,60 | (434.569.349,40) |
| | Bagian Laba Usaha Daerah | 3.194.529.749,63 | 3.075.748.742,12 | (118.781.007,51) |
| | Lain-lain PAD yang sah | 1.112.595.178,53 | 1.430.057.397,11 | 317.462.218,58 |
| II | <u>DANA PERIMBANGAN</u> | 343.129.040.638,59 | 346.670.398.466,97 | 3.541.357.828,38 |
| | Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak | 17.152.217.006,00 | 20.195.645.011,00 | 3.043.428.005,00 |
| | Dana Alokasi Umum | 292.700.000.000,00 | 292.700.000.000,00 | 0,00 |
| | Dana Alokasi Khusus | 11.680.000.000,00 | 11.680.000.000,00 | 0,00 |
| | Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi | 21.596.823.632,59 | 22.094.753.455,97 | 497.929.823,38 |
| II | Lain-lain Pendapatan yang Sah | 21.212.674.000,00 | 21.431.674.000,00 | 219.000.000,00 |
| | Lain-Lain Pendapatan Yang Sah | 21.212.674.000,00 | 21.431.674.000,00 | 219.000.000,00 |
| B | <u>BELANJA</u> | 406.961.896.013,69 | 396.426.761.200,19 | (10.535.134.813,50) |
| I | <u>APARATUR DAERAH</u> | 116.166.487.172,00 | 111.884.914.362,79 | (4.281.572.809,21) |
| | BELANJA ADMINISTRASI UMUM | 90.819.008.787,00 | 88.322.151.269,79 | (2.496.857.517,21) |
| | BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN | 20.544.469.136,00 | 18.876.973.620,00 | (1.667.495.516,00) |
| | BELANJA MODAL | 4.803.009.249,00 | 4.685.789.473,00 | (117.219.776,00) |

| NO | URAIAN | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan Anggaran | Keterangan | |
|----|---|--|--------------------|-----------------------|
| | | | Jumlah | Berlebih (Berkurang) |
| II | PELAYANAN PUBLIK | 290.795.408.841,69 | 284.541.846.837,40 | (6.253.562.004,29) |
| | BELANJA ADMINISTRASI UMUM | 200.533.791.475,00 | 198.045.960.039,00 | (2.487.831.436,00) |
| | BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN | 24.578.875.530,00 | 22.285.081.787,00 | (2.293.793.743,00) |
| | BELANJA MODAL | 36.084.282.800,00 | 35.338.900.691,00 | (745.382.109,00) |
| | BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN | 24.778.165.619,00 | 24.433.101.136,00 | (345.064.483,00) |
| | BELANJA TIDAK TERSANGKA | 4.820.293.417,69 | 4.438.803.184,40 | (381.490.233,29) |
| | SURPLUS (DEFISIT) | (11.740.664.846,94) | 2.453.131.441,61 | |

| NO | URAIAN | Jumlah Anggaran Setelah Perubahan Anggaran | Realisasi | | Keterangan |
|----|--|--|--------------------|----------------------|------------|
| | | | Jumlah | Berlebih (Berkurang) | |
| C | PEMBIAYAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| II | PEMBIAYAAN | | | | |
| I | PEMBIAYAAN | 14.324.261.796,94 | 39.624.168.126,94 | (25.299.906.330,00) | |
| | PENERIMAAN DAERAH | | | | |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu | 14.324.261.796,94 | 14.324.261.796,94 | 0,00 | |
| | Urusan Kas dan Perhitungan | 0,00 | 25.299.906.330,00 | -25.299.906.330,00 | |
| II | PENGELUARAN DAERAH | 2.583.596.950,00 | 42.077.299.568,55 | -39.493.702.618,55 | |
| | Penyertaan Modal | 1.643.000.000,00 | 1.609.606.432,00 | 33.393.568,00 | |
| | Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo | 940.596.950,00 | 940.596.826,26 | 123,74 | |
| | Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan | 0,00 | 14.220.009.113,29 | -14.220.009.113,29 | |
| | Urusan Kas dan Perhitungan | 0,00 | 25.307.087.197,00 | -25.307.087.197,00 | |
| | SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN | 11.740.664.846,94 | (2.453.131.441,61) | 14.193.796.288,55 | |